

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Krisis demografi yang dialami Jepang telah berkembang menjadi tantangan struktural yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan nasional Jepang. Penurunan angka kelahiran, penuaan populasi, serta penyusutan jumlah penduduk usia produktif menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada kapasitas produksi nasional, pertumbuhan ekonomi, sistem kesejahteraan sosial, dan stabilitas fiskal negara. Penyusutan tenaga kerja juga meningkatkan tekanan terhadap sektor-sektor penting seperti konstruksi, manufaktur, dan perawatan lansia yang sangat bergantung pada ketersediaan pekerja. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis demografi telah mempengaruhi kapasitas ekonomi dan sosial Jepang secara langsung, sehingga mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan imigrasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional negara.

Tekanan demografi tersebut kemudian mempengaruhi arah transformasi kebijakan imigrasi Jepang. Perkembangan kebijakan imigrasi Jepang menunjukkan adanya perubahan bertahap dari kebijakan yang sebelumnya sangat

membatasi penerimaan pekerja asing menuju kebijakan yang lebih terbuka terhadap kebutuhan tenaga kerja dari luar negeri. Meningkatnya kekurangan tenaga kerja membuat pemerintah Jepang mulai memperluas jalur masuk pekerja asing melalui berbagai skema, mulai dari *Technical Intern Training Program* (TITP) hingga pembentukan program *Specified Skilled Worker* (SSW). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja telah menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan negara. Dengan demikian, transformasi kebijakan imigrasi Jepang dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan demografi yang semakin mempengaruhi keberlanjutan ekonomi nasional.

Dalam perspektif kepentingan nasional, transformasi kebijakan imigrasi Jepang mencerminkan upaya negara dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, keamanan domestik, dan keberlanjutan sistem sosial. Hal ini sejalan dengan *National Security Strategy* Jepang yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan keberlangsungan masyarakat sebagai bagian penting dari kepentingan nasional negara. Krisis demografi dipandang dapat mengurangi kapasitas Jepang dalam mempertahankan daya saing ekonomi dan stabilitas sosial apabila tidak direspons melalui penyesuaian kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Jepang mulai mengintegrasikan kebijakan tenaga kerja asing ke dalam strategi nasional untuk menjaga keberlangsungan sektor ekonomi dan pelayanan sosial. Kebijakan imigrasi kemudian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam mempertahankan kepentingan nasional di tengah perubahan struktur demografi.

Program *Specified Skilled Worker* (SSW) menjadi bentuk konkret transformasi kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana kebijakan imigrasi digunakan untuk mendukung kepentingan nasional Jepang. Melalui pembukaan akses bagi pekerja asing berketerampilan spesifik pada sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja, Jepang berupaya menjaga keberlangsungan aktivitas industri dan pelayanan sosial yang penting bagi perekonomian nasional. Implementasi SSW juga menunjukkan bahwa tenaga kerja asing mulai diposisikan sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan SSW masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi *population decline* yang berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, transformasi kebijakan imigrasi Jepang melalui program SSW menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan strategi nasionalnya terhadap tekanan demografi, meskipun tantangan struktural yang dihadapi masih memerlukan respons kebijakan yang lebih luas dan berkelanjutan.

#### **4.2. Saran Penelitian**

Penelitian ini telah memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana krisis demografi mempengaruhi pemerintah Jepang dalam mentransformasi kebijakan imigrasi berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Melalui analisis mengenai krisis demografi, kepentingan nasional, dan transformasi kebijakan imigrasi Jepang, penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan akibat penyusutan populasi usia produktif dan penuaan penduduk telah mendorong Jepang untuk menyesuaikan kebijakan imigrasinya, khususnya melalui program Specified Skilled Worker (SSW). Dalam konteks tersebut, kebijakan imigrasi dipahami tidak hanya sebagai kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan nasional di tengah tekanan demografi yang semakin meningkat.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pembahasan secara lebih mendalam. Penelitian berikutnya dapat menganalisis sejauh mana program Specified Skilled Worker (SSW) benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji perbandingan efektivitas antara kebijakan penerimaan tenaga kerja asing dengan kebijakan domestik Jepang, seperti perpanjangan usia pensiun dan peningkatan partisipasi tenaga kerja usia lanjut, dalam mengurangi dampak krisis demografi. Penelitian lain juga dapat berfokus pada kebijakan peningkatan fertilitas sebagai

solusi jangka panjang untuk membalik kondisi population decline di Jepang, termasuk menganalisis efektivitas kebijakan keluarga, dukungan finansial, dan work-life balance dalam meningkatkan angka kelahiran. Dengan demikian, penelitian mengenai krisis demografi Jepang masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, baik dari aspek kebijakan imigrasi, ketenagakerjaan, maupun kebijakan kependudukan jangka panjang.